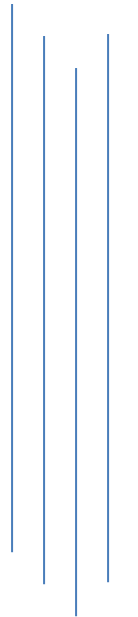




**RENCANA KERJA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Letjend. S. Parman No. 1b Tarutung 22411 Sumatera Utara

Telp. (0633) 21512 Fax. (0633) 20667

Web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : Bappelitbangda@taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan diferivikasi mengacu kepada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa untuk kepentingan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020 - 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara.

KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

Bab V : Penutup

KEEMPAT : Rencana Kerja berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023.

KELIMA : Dalam rangka Pengendalian pelaksanaan rencana kerja, maka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;

- Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang;

- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

- KEENAM** : Renja SKPD sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA,**



**LUHUT ARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650821 198712 1 002**

Tembusan :

1. Bupati / Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Utara di Tarutung;
3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kami menyadari dokumen Renja Tahun 2023 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tarutung,

2022



**BAPPEDALITBANGDA KABUPATEN
TAPANULI UTARA
KEPALA,**

**LUHUT ARITONANG, S.Sos
PEMUDA UTAMA MUDA NIP.
196508211987121002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi. ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang.....

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

TAPANULI UTARA TAHUN LALU7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu
 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten
 Tapanuli Utara 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten
 Tapanuli Utara 14

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Bappeda 16

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
 RKPD..... 17

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
 Masyarakat.....20

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN

TAPANULI UTARA.....22

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....22

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten
 Tapanuli Utara24

 3.3 Program dan Kegiatan.....25

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

TAPANULI UTARA.....30

BAB. V PENUTUP.....32

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Bappelitbangda kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD kabupaten Tapanuli Utara. Dokumen Renja Bappelitbangda Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah Perangkat Daerah Tahun 2023, sehingga dalam melakukan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara .

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah:

1.2.1. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bupati Tapanuli Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 terdiri dari :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Sampai dengan triwulan II tahun 2023;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappelitbangda ;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal ;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.4. Program dan Kegiatan

BABA IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2021 pada anggaran murni memuat 4 (empat) program, 12 (dua Belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat kegiatan) Sub Kegiatan, kemudian terjadi perubahan anggaran sehingga jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda setelah perubahan anggaran menjadi 4 (Empat) program, 13 (dua belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub kegiatan. Total alokasi anggaran Bappeda T.A 2021 setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 5.951.014.568,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian per Desember 2021 sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	7.341.325.562,00	5.951.014.568,00	81,06	5.520.641.662,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	7.012.895.362,00	5.696.521.746,00	81,23	5.520.641.662,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.794.271.969,00	3.459.187.827,00	91,17	3.393.264.496,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.218.623.393,00	2.237.333.919,00	69,51	2.127.377.166,00
5 . 2	BELANJA MODAL	328.430.200,00	254.492.822,00	77,49	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.311.800,00	254.492.822,00	78,47	0,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.118.400,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.341.325.562,00)	(5.951.014.568,00)	81,06	(5.520.641.662,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.341.325.562,00)	(5.951.014.568,00)	81,06	(5.520.641.662,00)

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun berjalan

disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Renstra Perangkat Daerah) s/d kondisi terakhir Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	
5	1	1.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Dokumen	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	50
5	1	1.2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja	50
5	1	1.2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	50
5	1	1.2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertlaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 Laporan Bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	50
5	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	50
5	1	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	50
5	1	1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50
5	1	1.2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	50
5	1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	
5	1	1.2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	10 Orang	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	50
5	1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	3 Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	50
5	1	1.2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	4 PC, 5 Printer	50
5	1	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	

5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor		9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	50
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD		Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tertaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tertaksananya pelaksanaan konsultasi publik	5 Dokumen	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara		Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	50
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tertaksananya pelaksanaan forum SKPD	10 Dokumen	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara		Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	50
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tertaksananya pelaksanaan Musrenbang	10 Dokumen	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara		Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	50
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD		Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	50
5	1	2	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tertaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan		2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	50
5	1	2	2.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tertaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	20 Laporan	1 Laporan per triwulan		1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	50
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan program RPJMD, RENSTRA dan RKPD							
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	60 Dokumen	25 Dokumen		8 Dokumen dan 4 Laporan	8 Dokumen dan 4 Laporan	8 Dokumen dan 4 Laporan	50
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60 Dokumen	5 Dokumen		3 Dokumen, 2 Laporan	3 Dokumen, 2 Laporan	3 Dokumen, 2 Laporan	50
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60 Dokumen	5 Dokumen		2 Laporan Moneva	2 Laporan Moneva	2 Laporan Moneva	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

Capaian kinerja pelayanan pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014- 2019 dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai AKIP Bapplitbangda Kabupaten Sanggau			70,73	71	71,50	71,80	70,73	-	71,50	71,80	
2	Indeks Perencanaan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Kinerja Pembangunan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang			90%	90%	90%	90%	100%	-	90%	90%	

Bappelitbangda selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah

provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Berangkat dari fenomena tersebut Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappelitbangda

Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
3. Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi perencana; dan

5. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan pada pemerintah daerah;
7. Belum tersedianya fungsional peneliti; dan
8. Belum terbangunnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.4. Review Terhadap RKPD 2023

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengalami yang signifikan dan telah sesuai dengan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2019-2024, Namun ada terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2023 Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah		7.059.355.873	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.784.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	36.784.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3.040.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	7.186.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2.004.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Lakip	4.443.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	9.010.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan bulanan	25.155.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.770.397.153	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	4.191.912.280	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	3.716.417.753	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	4.135.074.780	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	51.979.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	51.979.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang valid dan memadai	12	2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang valid dan memadai	1 Dokumen laporan keuangan	4.858.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2 orang / nama diklat	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappelitbangda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	59.700.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappelitbangda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 orang / nama diklat	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah			10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	479.656.793	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappelitbangda	Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan	12	5.011.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappelitbangda	Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan	10 jenis komponen listrik	11.051.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	22.973.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis perlengkapan kantor	43.582.693	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	2.921.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 jenis peralatan RT	6.435.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappelitbangda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	39.917.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappelitbangda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	80.737.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappelitbangda	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	47.503.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappelitbangda	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	55.263.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12	235.278.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12 bulan	282.587.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.225.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4 PC,5 Printer	36.868.300	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.225.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 PC,5 Printer	36.868.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.350.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	183.483.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	jumlah Paket/Surat terkirim	12 bulan	2.088.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	jumlah Paket/Surat terkirim	12 bulan	4.245.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappelitbangda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.184.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappelitbangda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	107.155.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	72.077.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	72.077.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.335.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.626.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	52.290.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	36.655.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	6.045.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	6.045.400	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				706.319.700	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				695.472.100	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	30.320.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	50.087.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan RKPd dan Berita Acara	42.513.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan RKPd dan Berita Acara	63.753.600	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Akhir RKPd dan Berita Acara	235.986.700	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Akhir RKPd dan Berita Acara	267.635.300	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen RKPd 2023, RKPd 2021 dan RPJMD	397.500.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen RKPd 2023, RKPd 2021 dan RPJMD	313.994.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				265.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				81.636.900	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dok	125.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	44.075.600	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dok	140.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Laporan per triwulan	37.561.300	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				265.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				81.636.900	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Tertaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	12 Bulan	24.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Tertaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	12 Bulan	24.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase data dan Informasi perencanaan program Pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		243.999.600	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase data dan Informasi perencanaan program Pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		243.999.600	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30.647.400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30.647.400	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	13.058.400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	13.058.400	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	12.699.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	12.699.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	87.512.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	87.512.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen, 2 Laporan	75.812.100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen, 2 Laporan	75.812.100	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Tertaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan Moneva	24.270.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Tertaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan Moneva	24.270.700	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan		156.986.100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan		156.986.100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	96.601.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	96.601.100	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	30.385.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	30.385.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	3 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	3 Laporan	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				110.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			12 dokumen perencanaan OPD + 10 dokumen Proposal /Usulan PD + 6 laporan Moneva	110.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		31.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 dokumen renja OPD (PUPR, Perkim, Perhubungan)	31.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		31.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 dokumen	31.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		9.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan Moneva PD	9.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		15.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 dokumen renja OPD (Lindup, Pariwisata, BPBD)	15.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen PD	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		9.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan Moneva PD	9.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Prosentase hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		480.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Prosentase hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		480.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		480.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		480.000.000	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		160.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen Studi Kelayakan dan 1 Dokumen Masterplan	160.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		140.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		140.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Partisipasi Masyarakat		160.000.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Partisipasi Masyarakat	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Partisipasi Masyarakat		160.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Bidang Ekonomi dan Pembangunan		106.600.000	Persentase Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Bidang Ekonomi dan Pembangunan		106.600.000	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah	Bappelitbangda	Persentase Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah		106.000.000	Persentase Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah	Bappelitbangda	Persentase Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah		106.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappelitbangda	Dokumen Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		98.827.300	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappelitbangda	Dokumen Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Nilai IGA : 301-500	77.367.300	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat										

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III
TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Sesuai arahan RPJMN 2020-2024, sasaran jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangsan Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024;
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's). dimana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Bappelitbangda.

Dalam Renja tahun 2023 ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 6.392.789.153,-. Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	TARGET		Pagu		Bertambah/ Berkurang	Alasan
						Semula	Menjadi		Renja 2023	Renja	Renja 2023	Renja 2023		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1		1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	100%	100%	6.677.336.393	6.412.468.991	-264.867.402	P-APBD
5	1	1	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	4.708.487.939	4.452.667.291	-255.820.648	P-APBD
5	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	7.186.500	5.886.500	-1.300.000	P-APBD
5	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	4.443.000	1.794.000	-2.649.000	P-APBD
5	1	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	25.155.400	25.155.400	0	P-APBD
5	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	3.747.372.380	3.565.386.591	-181.985.789	P-APBD
5	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	3.690.535.080	3.508.549.291	-181.985.789	P-APBD
5	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	51.979.200	51.979.200	0	P-APBD
5	1	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	4.858.100	4.858.100	0	P-APBD
5	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	-	0	0	
5	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	59.700.000	0	-59.700.000	P-APBD
5	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	12 bulan	470.897.500	479.431.693	8.534.193	
5	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	11.051.200	11.051.200	0	P-APBD

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	1	2.06	2	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	43.806.000	43.806.000	43.806.000	P-APBD
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	6.443.500	6.443.500	0	P-APBD
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	74.276.700	86.887.200	12.610.500	P-APBD
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	52.732.100	52.732.100	0	P-APBD
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	282.588.000	421.448.000	138.860.000	P-APBD
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	138.605.300	275.886.900	137.281.600	P-APBD
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	51.940.900	53.520.900	1.580.000	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	126.510.900	183.477.900	56.967.000	P-APBD
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	4.248.400	4.248.400	0	P-APBD
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	50.184.800	43.754.700	-6.430.100	P-APBD
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	72.077.700	72.077.700	0	P-APBD
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	213.497.659	94.412.000	-119.085.659	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	23.410.000	30.059.400	6.649.400	P-APBD
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	6.045.400	6.045.400	0	P-APBD
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	19.484.200	11.261.700	-8.222.500	P-APBD
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	12 bulan	12 bulan	150.728.059	0	-150.728.059	P-APBD
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	12 bulan	13.830.000	11.130.000	-2.700.000	P-APBD

1					2		3		4		5	6	7	8	9	10
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	843.282.000	1.372.730.900	529.448.900	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				630.484.300	1.238.422.000	607.937.700	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik		Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	50.087.200	50.087.200	0	P-APBD
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Terlaksananya pelaksanaan forum SKPD		Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	62.759.800	48.582.500	-14.177.300	P-APBD
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang		Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	267.637.300	260.837.300	-6.800.000	P-APBD
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten		Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	250.000.000	407.989.300	157.989.300	P-APBD
5	1	2	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				102.561.300	134.308.900	31.747.600	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	65.000.000	65.000.000	0	P-APBD
5	1	2	2.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah		1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	37.561.300	77.997.000	40.435.700	P-APBD
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan program RPJMD, RENSTRA dan RKPD				1.227.037.900	955.092.500		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia		25 Dokumen	8 Dokumen dan 4 Laporan	300.553.400	469.508.400	168.955.000	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		5 Dokumen	1 Dokumen	57.156.000	57.156.000	0	P-APBD
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		5 Dokumen	1 Dokumen	17.921.300	124.496.300	106.575.000	P-APBD
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		5 Dokumen	1 Dokumen	17.428.200	17.428.200	0	P-APBD
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		5 Dokumen	2 Dokumen	70.695.000	127.720.000	57.025.000	P-APBD

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5				Penelitian dan Pengembangan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan			262.351.500	312.351.500		
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen Studi Kelayakan dan 1 Dokumen Masterplan	1 Dokumen Studi Kelayakan dan 1 Dokumen Masterplan	200.000.000	200.000.000	0	
5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Parawisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya penelitian dan pengembangan parawisata	1 Dokumen Studi Kelayakan dan 1 Dokumen Masterplan	1 Dokumen Studi Kelayakan dan 1 Dokumen Masterplan	200.000.000	200.000.000	0	P-APBD
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi			62.351.500	112.351.500	50.000.000	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya diseminasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif melalui penilaian IGA	Nilai IGA : 301-500	Nilai IGA : 301-500	62.351.500	112.351.500	50.000.000	P-APBD

TABEL 3.2
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN & PAGU
RKPD 2023

Kode						URUSAN	Jumlah PROGRAM				Jumlah KEGIATAN				Jumlah SUB KEGIATAN				Jumlah PAGU				Jumlah Pagu Baru	Jumlah Kegiatan/Sub Kegiatan Baru
							Renja 2023	APBD 2023	PENYEMPURNAAN APBD 2023	PERUBAHAN RENJA 2021	Renja 2023	APBD 2023	PENYEMPURNAAN APBD 2023	RENJA 2021	Renja 2023	APBD 2023	PENYEMPURNAAN APBD 2023	RENJA 2021	Renja 2023	APBD 2023	PENYEMPURNAAN APBD 2023	RENJA 2023		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	3	3	3	11	11	11	11	42	42	42	42	6.677.336.939	6.677.336.939	6.361.139.340	6.412.468.991	6.100.117.491	0
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	262.351.500	262.351.500	262.351.500	312.351.500	312.351.500	0

TABEL 3.3

REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target		PAGU		Bertambah/Berkurang	Alasan
					Semula	Menjadi		Renja 2023	Renja	Renja 2023	Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	100%	100%	6.677.336.393	6.412.468.991	-264.867.402	
5	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	4.708.487.939	4.452.667.291	-255.820.648	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	7.186.500	5.886.500	-1.300.000	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	4.443.000	1.794.000	-2.649.000	
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	25.155.400	25.155.400	0	
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	3.747.372.380	3.565.386.591	-181.985.789	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	3.690.535.080	3.508.549.291	-181.985.789	
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	51.979.200	51.979.200	0	
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	4.858.100	4.858.100	0	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	-	0	0	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	59.700.000	0	-59.700.000	Tidak dapat dilaksanakan
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	12 bulan	470.897.500	479.431.693	8.534.193	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	11.051.200	11.051.200	0	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	43.806.000	43.806.000	43.806.000	
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	6.443.500	6.443.500	0	Refocusing Anggaran
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	74.276.700	86.887.200	12.610.500	Refocusing Anggaran
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	52.732.100	52.732.100	0	Refocusing Anggaran

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	282.588.000	421.448.000	138.860.000	Refocusing Anggaran								
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	138.605.300	275.886.900	137.281.600									
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	51.940.900	53.520.900	1.580.000	Refocusing Anggaran								
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	126.510.900	183.477.900	56.967.000									
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	4.248.400	4.248.400	0	Refocusing Anggaran								
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	50.184.800	43.754.700	-6.430.100									
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	72.077.700	72.077.700	0									
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	213.497.659	94.412.000	-119.085.659									
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	23.410.000	30.059.400	6.649.400	Refocusing Anggaran								
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	6.045.400	6.045.400	0	Pergantian Sparepart Kendaraan Dinas Kepala Bappelitbangda								
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	19.484.200	11.261.700	-8.222.500									
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	12 bulan	12 bulan	150.728.059	0	-150.728.059									
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	12 bulan	13.830.000	11.130.000	-2.700.000									
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	843.282.000	1.372.730.900	529.448.900									
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			630.484.300	1.238.422.000	607.937.700									
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	50.087.200	50.087.200	0									
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya pelaksanaan forum SKPD	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	62.759.800	48.582.500	-14.177.300									
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	267.637.300	260.837.300	-6.800.000	Refocusing								

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten	Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	250.000.000	407.989.300	157.989.300	Refocusing
5	1	2	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			102.561.300	134.308.900	31.747.600	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	65.000.000	65.000.000	0	Refocusing
5	1	2	2.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	37.561.300	77.997.000	40.435.700	Refocusing

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;

2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

3) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

1. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

3) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan total alokasi anggaran Rp. 6.382.789.753,- yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas Serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Juli 2022

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA,**

**LUHUT ARITONANG, S.Sos
PEMERINTAH UTAMA MUDA
NIP. 196508211987121002**

